

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010  
*Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003  
*Tentang Keuangan Negara.* (2003). Jakarta
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  
*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (2009). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  
2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.* (2014). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
*Tentang Pemerintah Daerah.* (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  
*Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan  
pemerintahan Daerah.* (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64  
Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis  
Akrual.*
- Ardiansyah, Vitalis Ari, Widiyaningsih (2014). Pengaruh Pendapatan Asli  
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks  
Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2006 - 2007,  
Katalog BPS: 4102002. Jakarta: Indonesia
- Badan Pusat Statistik, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2008 - 2009.  
Jakarta: Indonesia
- Bawono, I.R., & Novelsyah, M., (2012). *Tata Cara Penatausahaan Dan  
Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD*, Jakarta:  
Salemba Empat.
- Bhakti, N. A. & Istiqomah & Suprpto. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang  
mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 2008-  
2012. *Ekuitas: jurnal ekonomi dan keuangan*, Akreditasi No.  
80/DIKTI/Kep/2012, ISSN: 1411-0393.

- Elika, E. P & Resnawaty, R & Gutama, A. S. (2017). Bencana Sosial Kasus Lumpur PT. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. *Jurnal penelitian dan PKM*, Vol 4 No.2, hal: 129-389, ISSN: 2442-448x (p), 2581-1126 (e).
- Fretes, P. N de (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, Vol.2 No.2, September 2017, ISSN: 2541-0180.
- Ghozali, I., (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, R. U. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.11 No.1/Maret 2011.
- Irwanti, Eva. (2014). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi di Papua Barat Periode 2008-2012. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*, Edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marizka, R (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011). *Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi: Universitas Padang*.
- Nurhasanah & Maria. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vo. 1 No. 1
- Pambudi, S. B. (2008). Analisis Pengaruh tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen: Institut Pertanian Bogor*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*. (2005). Jakarta.
- Putra, P. G. M & Ulupui, I. G. K. A (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. ISSN : 2302 – 8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3: 863-877.
- Prima, A. (2012). *Lumpur Lapindo Sebabkan Pelanggaran HAM*. *Kompas.com* 15 Agustus 2012, 04:23. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/15/04234381/lumpur.lapindo.sebabkan.pelanggaran.ham> tanggal 17 februari pukul 20:00 WIB.
- Sarkoro, H. & Zulfikar (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan keuangan Indonesia*.
- Sarwono, J. (2015). *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Setyowati, L. & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Prestasi Vol.9 No.1-Juni 2012*. ISSN 1411 – 1497.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta
- Suhab, S. & Kusreni, S. (2009). Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *DIE-Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5 No 3 April.
- Williantara, G. F. & Budiasih, I. G. A. N (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umu, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.3. September 2016: 2044-2070.
- Zebua, W. F. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.